

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Jatmiko. (2012:393). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal *Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*.
- Bugin.2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana
- Bastian. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. (Skripsi Stefanus Dimasias Aditya, Universitas Sanata Darma Yogyakarta.2018)
- Basri, F dan H Munandar(2009:519). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah struktural, tranformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Bastian,I. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat
- Damayanti Wienda. 2018. Skripsi. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Surakarta:Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Dewi Sartika dan Nini. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunuang. Jurnal *Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* 20(1).
- Diktum Keempat Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
- Dictionary Webster New World. *Pengertian Data*
- Eko. (2014). Menjelaskan negara berdiri mengikuti perkembangan zaman
- Elowod. (1993). Prosedur Pemeriksaan atau audit yang diproses secara hukum
- Faradhiba laily dan Diana Nur. 2018. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Malang. 07(07)
- Gayatri dkk. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DanaDesa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. 10(2). 175-182
- Hoesada. (2016:32). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Intan Meutia dan Liliana.2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. 8(2). 227-429

Kartodikusumo, Sutardjo. Pengertian Desa

Leksono.2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: dari metodologi ke metode*. Jakarta: Rajagrafindi Persada

Mahsun, M. (2014:84). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE

Mardiasmo. (2004:5). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Andi Offset

Nafidah Lina Nasehatun dan Anisa Nur. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi.10(2). 273-288

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945(sebelum perubahan). Sejarah dan Kedudukan Negara

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja, dan pembiayaan desa

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 133 Pasal 2 dan 21 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keuangan Desa dikelola Berdasarkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan desa

Pramesti Firdha Ayu. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Profil Desa Karang Tahun 2018

Rahardjo. 2011. *Pemahaman Undividu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise

Rosy Armaini. 2017. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu. 6(1)

Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Solekhan. (2012:37). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang:Setara Press
- Sumpeno. (2011:25). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh
- Susetiawan. (2009). Desa bersifat otonom dan selalu dinamis
- Syamsudin. (2007:328). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta
- Tanjung,A.H. (2006:9). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung:Alfabeta
- Tambuwun Fernando Victory dkk.2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Peratanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi* 13(4). 76-84
- Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Pengertian Keuangan
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 tentang Desa Adat
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 Pasal 97 tentang syarat Desa Adat
Undang-undang No 32Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah
- Undang-undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa
- Undang-undang No 18 Tahun 1965 TentangPokok-pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 19 Tahun 1957 Tentang Desa Praja

- Undang-undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 88 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara
- Usman Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Perkasa
- Utomo dan Wahyudi. (2008). Tentang isu otonomi daerah
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Salemba Empat
- Widyanti Rina. 2018. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Menara Ilmu*. 12 (11)
- Wijaya David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Widodo. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Waris. (2012:38). *Pergeseran Paradigma Sentralisasi Dalam Mewujudkan Good Government*. *Jurnal Kebijakan Publik*. 1-55
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016:47). Rangkaian dan asas Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Zeyn. 2011. Pengaruh good government dan standart akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Riview Akuntansi dan Keuangan*. (Skripsi Stefanus Dimasias Aditya, Universitas Sanata Darma Yogyakarta. 2018)
- Zulfan Nahrudin. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dan Alokasi Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tantene Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(2)